

MENANGGAPI PLURALISME DALAM MASYARAKAT MODERN: PERAN DEMOKRASI, PANCASILA, DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME POLITIK

Calvita, Marshella Cenvysta, Chievo Gabriel Bonar Butar-Butar

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Calvita

Abstract

As the largest archipelagic country in the world, Indonesia boasts a rich cultural heritage. Pluralism exemplifies this diversity. Various aspects of life have been transformed by modernization, including how society perceives differences. Pluralism, which fosters diversity across cultural, religious, and ideological dimensions, shapes a modern society where people from diverse backgrounds coexist. Beyond enriching culture, pluralism promotes tolerance, mutual understanding, and enhances opportunities for innovation and collaboration. However, pluralism also presents challenges, one of which is political extremism fueled by primordial sentiments and intolerance, posing a real threat to democracy and social stability. It is hoped that Indonesia's democracy, rooted in the national ideology of Pancasila, can serve as a foundation to address political extremism while safeguarding pluralism by supporting a unifying ideology and suppressing minority groups. Pluralism in modern society is an undeniable reality. When approached earnestly by all parties, pluralism can contribute to building a fair, peaceful, and prosperous community.

Keywords: Pancasila; Democracy; Pluralism; Political Extremism

PENDAHULUAN

Salah satu pilar yang paling penting dalam membangun masyarakat yang adil, nyaman, dan progresif adalah demokrasi, sebuah aspirasi untuk kedaulatan nasional dan pemerintahan representatif. Sistem pemerintahan yang didirikan oleh rakyat Indonesia memberikan warganya kebebasan untuk menentukan cara hidup dan masa depan mereka. Berdasarkan Pancasila, sebuah ideologi nasionalis Indonesia yang menekankan prinsip-prinsip moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kemajuan sosial.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut meliputi Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Perlakuan yang Adil dan Beradab terhadap sesama manusia, Persatuan dalam keberagaman Indonesia, Pengambilan keputusan bersama berdasarkan kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan, serta Pemberian keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari fakta bahwa demokrasi dan Pancasila di Indonesia telah menjadi tulang punggung pemerintah Indonesia dan hak rakyat untuk hidup, masih terdapat banyak pertanyaan yang tersisa di dalamnya. Di era globalisasi yang sudah modern ini, bermunculan ide-ide dan konsep-konsep baru yang dapat mengubah demokrasi. Terlebih banyak orang yang tidak memahami atau menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Ekstremisme politik merupakan salah satu tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia.

Ekstremisme politik adalah ancaman besar bagi stabilitas dan keutuhan bangsa jika tindakan dan keyakinan melampaui batas demokrasi dan toleransi. Prinsip dasar demokrasi dan

hak asasi manusia ditentang oleh ekstrimis politik. Ekstremisme Islam dan ekstremisme anti-aborsi adalah dua ekstrem pada spektrum biologi. Tindakan kejahatan yang terinspirasi oleh ideologi, seperti terorisme, adalah contoh lain dari ekstrimisme politik. Politik dengan integritas rendah dapat memanfaatkan kelemahan dan hak-hak orang lain tanpa mengakui kesalahan mereka sendiri.¹

Bertentangan dengan menekankan bahwa kegiatan mereka sendiri tunduk pada perdebatan, politik Ekstrimis juga mengakui bahwa itu melibatkan dan membingungkan orang lain. Selain itu, mereka menggunakan intimidasi dan manipulasi untuk menyembunyikan kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri, dan beberapa individu menggunakan agama untuk mencapai tujuan mereka untuk mendapatkan kepercayaan dan pemahaman bahwa kehadiran Tuhan ada dalam organisasi mereka dalam segala keadaan.² Intoleransi, ekstremisme agama, dan separatisme adalah beberapa bentuk yang dapat diambil oleh ekstremisme politik. Beberapa penyebab ekstremisme politik termasuk kekecewaan sosial, frustrasi politik dan propaganda.

Rakyat Indonesia dikenal karena keberagaman mereka yang meliputi berbagai agama, etnis, dan budaya. Pluralisme politik menjadi landasan bagi kehidupan bersama di tengah keberagaman ini. Ekstremisme, yang cenderung memaksakan satu ideologi dan mengancam kelompok minoritas, bisa memicu konflik dan pertentangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ekstremisme politik, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila berperan dalam memenuhi kebutuhan akan pluralisme dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif untuk mengklarifikasi hubungan antara ekstremisme politik, prinsip-prinsip Pancasila, dan demokrasi dalam menangani tantangan pluralisme dalam masyarakat kontemporer. Metode penelitian ini akan melibatkan analisis dokumen secara menyeluruh. Untuk memastikan keabsahan temuan, metode triangulasi akan digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi hasil dari berbagai sumber data. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dan demokrasi dapat menjadi solusi potensial dalam mengatasi tantangan pluralisme dan mengurangi risiko ekstremisme politik di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Antara Demokrasi, Pancasila, dan Ekstremisme Politik dalam Konteks Masyarakat Modern

Kata “Demos” dan “Kratos” berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti “rakyat” atau “khalayak” masing-masing, sedangkan “demokrasi” berarti “pemerintahan”. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan warga negara hak dan sarana untuk mengekspresikan kehendak mereka dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik.³ Di antara negara-negara yang terletak di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang telah membuat komitmen terhadap sistem demokrasi. Sistem demokrasi Indonesia juga diakui dalam kerangka konstitusi negara. Akibatnya, warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pemimpin melalui pekerjaan umum. Sejak awal proses reformasi pada tahun 1998 telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Hal ini memberikan warga kesempatan untuk berpartisipasi dalam

¹ Tom Murse, “Apa itu Ekstremisme Politik”. 2 Juli 2019.

² Ibid

³ Mochamad Aris Yusuf, “Pengertian Demokrasi : Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip”.

proses pemilihan melalui penggunaan proses seleksi umum. Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal implementasi prinsip-prinsip demokrasi sejak reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Terlepas dari keberadaan tantangan dan dinamika politik yang konstan, semangat demokrasi terus tumbuh dan berfungsi sebagai dasar utama untuk kemajuan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Penting dalam administrasi publik, prinsip-prinsip demokrasi ini mempertahankan martabat alami setiap individu dan hak mereka untuk bebas mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pancasila sekaligus dasar negara memberikan landasan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Asal Usul Hukum dan Sistem Hukum Nasional menjelaskan tentang peranan dan fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk pemerintahan negara, khususnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh alasan yang disebutkan di atas.⁴

Di Indonesia, Pancasila keyakinan dan prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi adalah ukuran kesejahteraan sosial dan harmoni antara berbagai bentuk kehidupan, yang disatukan oleh Pancasila, dan serupa, prinsip demokrasi dan Pancasila saling bergantung dan saling melengkapi satu sama lain.

Tantangan Pluralisme dalam Masyarakat Modern

Pluralisme adalah konsep penting dalam masyarakat modern, yang menekankan penerimaan dan pengakuan perbedaan. Meskipun pluralisme mengajarkan untuk menghargai keberagaman, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Ini termasuk kesalahpahaman, risiko konflik kelompok, stereotip yang dapat muncul, perbedaan norma dan nilai, dan masalah identitas nasional. Berikut adalah penjelasan menyeluruh tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pluralisme:

1. Risiko terjadinya konflik antar kelompok
Perpecahan dan konflik sering terjadi di antara komunitas yang berasal dari berbagai latar belakang. Upaya oleh kelompok untuk memperoleh sumber daya umum, seperti tenaga kerja, serta perbedaan dalam produktivitas dan nilai ekonomi, dapat terjadi. Karena ketegangan dan perselisihan ini, kemajuan dan pembangunan dapat terhambat. Seperti yang dijelaskan oleh Samuel Huntington dalam "Perang Budaya" (1996), ketidaksetujuan yang berasal dari nilai-nilai yang berbeda dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Selain itu, kelompok lain dapat merasa terpinggirkan atau terkucilkan oleh kebijakan yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu.⁵ sebagaimana yang dijelaskan oleh Francis Fukuyama dalam "*Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*" (2018). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan memenuhi kebutuhan setiap kelompok dengan cara yang adil dan seimbang⁶.
2. Kesalahpahaman dan stereotip yang muncul
Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang budaya dan tradisi kelompok lain sering menyebabkan kesalahpahaman antar kelompok di masyarakat yang sangat beragam. Tindakan yang dianggap sopan oleh suatu kelompok bisa jadi dianggap tidak sopan oleh kelompok lain. Sebaliknya, stereotip merupakan pandangan yang sederhana dan sering kali tidak tepat tentang suatu kelompok, yang timbul dari asumsi umum atau pengalaman pribadi yang terbatas. Menurut Gordon Allport dalam "*The Nature of Prejudice*" (1954), stereotip memiliki potensi untuk menimbulkan prasangka dan diskriminasi, dan sering kali sulit untuk

⁴Nikita Rosa Damayanti, "Apa itu Pancasila? Ini Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya". 31 Mei 2022.

⁵ Samuel Huntington, "*The Clash of Civilizations*", Simon & Schuster, 1996

⁶ Francis Fukuyama, "*The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*", Farrar, Straus and Giroux, 2018

dihapuskan karena telah melekat dalam budaya populer. Pendidikan dan komunikasi antar kelompok menjadi kunci dalam mengatasi stereotip dan kesalahpahaman. Melalui percakapan dan pertukaran budaya, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan serta mengatasi hambatan yang timbul akibat stereotip dan kesalahpahaman.⁷

3. Perbedaan nilai dan norma yang bisa menyulitkan integrasi

Dalam masyarakat pluralis, perbedaan norma dan nilai dapat menghalangi integrasi sosial. Setiap kelompok memiliki sistem nilai, kepercayaan, dan norma yang berfungsi sebagai dasar kehidupan sosial dalam masyarakat yang lebih besar, yang dapat membuat proses adaptasi dan integrasi menjadi lebih sulit di masyarakat yang lebih besar.

Contohnya, suatu tindakan mungkin dianggap sopan oleh satu kelompok tetapi tidak sopan oleh kelompok lain. Miskomunikasi, prasangka, dan bahkan konflik dapat terjadi karena perbedaan ini. Untuk integrasi yang berhasil, orang harus saling memahami dan menghargai standar dan nilai kelompok masing-masing. Hal ini bukan perkara mudah, terutama dalam situasi di mana dapat terjadi perbedaan fundamental dalam hal-hal seperti hak asasi manusia, gender, dan kebebasan beragama. Menurut "*Identity and Violence: The Illusion of Destiny*" (2006) yang ditulis oleh Amartya Sen, mengakui dan menghargai perbedaan menyebabkan perpelukan yang mendalam dan penuh kasih sayang.⁸

4. Isu-isu identitas dan nasional

Dalam masyarakat pluralis, identitas seringkali menjadi perhatian karena kelompok tertentu merasa identitas mereka terancam oleh dominasi kelompok lain, yang dapat mengakibatkan reaksi defensif dan upaya keras untuk mempertahankan identitas. Nasionalisme sering kali dianggap sebagai tanggapan terhadap ancaman terhadap identitas kolektif dalam konteks seperti ini. Menurut Benedict Anderson dalam "*Imagined Communities*" (1983), ketidakpastian mengenai identitas dalam pluralisme seringkali menjadi pemicu munculnya nasionalisme. Situasi semacam ini dapat memunculkan konflik, terutama jika kelompok mayoritas dianggap berusaha untuk menghilangkan atau merampas identitas kelompok minoritas. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi masyarakat untuk mendorong dialog dan pemahaman antarkelompok. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa setiap kelompok merasa dihormati dan diakui dalam lingkungan yang lebih luas.⁹

Masyarakat modern menghadapi banyak masalah karena pluralisme, yang mengutamakan keragaman. Konflik, kesalahpahaman, dan stereotip seringkali muncul sebagai akibat dari pluralisme, meskipun prinsip idealnya adalah mendorong penerimaan dan pengakuan perbedaan. Diferensiasi ini dapat menjadi salah satu hambatan. Solusi terbaik di tengah banyaknya tantangan pluralisme adalah mengakui kehadiran dan perbedaan setiap kelompok.

Kontribusi Demokrasi dan Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Pluralisme

Peran demokrasi dan Pancasila sangat penting dalam mengatasi masalah pluralisme. Demokrasi menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan pengelolaan pluralisme yang damai dan konstruktif melalui prinsip-prinsipnya seperti penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Selain itu, Pancasila memiliki banyak fungsi dan kedudukan, termasuk sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup masyarakat, dan bangsa. Dalam menangani masalah pluralisme, demokrasi dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Menjamin hak-hak minoritas

⁷ Gordon Allport, "*The Nature of Prejudice*", Addison Wesley, 1954

⁸ Amartya Sen, "*Identity and Violence: The Illusion of Destiny*", W.W. Norton & Company, 2006

⁹ Benedict Anderson, "*Imagined Communities*", Verso, 1983

Demokrasi mengurangi kemungkinan diskriminasi dan marginalisasi, melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk hak-hak kelompok minoritas, dan memberikan rasa aman bagi semua kelompok masyarakat untuk hidup dan berkembang.¹⁰

2. Membangun konsensus

Sistem demokrasi menyoroti pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan kelompok-kelompok yang beragam untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan menghindari penentuan keputusan secara sepihak oleh kelompok mayoritas.¹¹

3. Meningkatkan toleransi

Demokrasi membangun budaya yang menghormati dan toleran. Orang-orang di negara ini dididik untuk menerima perbedaan dan hidup berdampingan dengan orang lain dengan damai.¹²

Bahkan dalam masyarakat demokratis, masalah pluralisme akan tetap ada. Namun demikian, demokrasi memberikan alat penting untuk mengendalikan pluralisme secara aman dan konstruktif. Pancasila juga memiliki peran. Pancasila sangat penting untuk keberagaman Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu:

1. “Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
3. “Persatuan Indonesia”
4. “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan”
5. “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Dengan cara tertentu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dapat membantu dalam mengatasi masalah pluralisme, yaitu:¹³

1. Menyatukan bangsa

Ideologi Pancasila berfungsi sebagai pengikat bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman yang kaya. Hak setiap warga negara untuk memilih agama atau kepercayaan mereka sendiri diprioritaskan dalam Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, dalam Sila Kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ditekankan bahwa hak asasi manusia harus dihormati secara setara.

2. Mendorong toleransi

Pancasila juga menjadi pendorong bagi toleransi dan penghargaan dalam masyarakat. Konsep persatuan Indonesia menekankan bahwa perbedaan di antara kita seharusnya dilihat sebagai berkah, bukan sebagai ancaman, seperti yang tercermin dalam Sila ketiga.

3. Mengembangkan Masyarakat mufakat

Selain itu, Pancasila mendorong proses musyawarah dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Sila keempat, yang menegaskan pentingnya kerakyatan yang berlandaskan pada hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan atau musyawarah, menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan menghormati pendapat setiap warga negara.

4. Menciptakan keadilan sosial

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, upaya mewujudkan keadilan sosial juga menjadi perhatian utama. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi

¹⁰ Arend Lijphart, *“The Role of Democracy in Plural Societies”* Oxford University Press, 2012

¹¹ Ibid

¹² Yascha Mounk, *“Democracy and Pluralism”* Harvard University Press, 2017.

¹³ BPIP, *“Pancasila: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia”* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2023

seluruh rakyat Indonesia dan menegaskan komitmen untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, Indonesia menampilkan kekayaan yang besar. Namun, bersamaan dengan keberagaman tersebut, juga muncul potensi konflik dan perpecahan. Di titik ini, peran Pancasila dan demokrasi menjadi sangat penting dalam membentuk Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Sebagai dasar negara, Pancasila menawarkan nilai-nilai yang tinggi dan dapat menjadi solusi atas tantangan pluralisme. Setiap sila dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjamin kebebasan beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab yang menekankan kesetaraan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang mengadvokasi pemerataan, semuanya bertujuan untuk menyatukan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tak kalah pentingnya, demokrasi, dengan prinsip-prinsipnya seperti toleransi, musyawarah mufakat, dan penghargaan terhadap perbedaan, memberikan kerangka kerja yang penting untuk mengelola pluralisme dengan damai dan konstruktif. Demokrasi memastikan hak-hak minoritas, memberi ruang untuk dialog antarkelompok, dan mendorong tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan.

Ekstremisme Politik

Ekstremisme politik merujuk pada tingkat kekuatan yang sangat tinggi dalam mendukung pandangan, ajaran, atau konsep tertentu, yang sering kali menghasilkan perilaku yang jauh melampaui batas yang wajar. Ekstremisme ini biasanya diikuti oleh gerakan yang mendorong tindakan kekerasan guna mencapai tujuan yang dipegang secara ekstrem atau untuk mempertahankan keyakinan yang ekstrem, bahkan jika itu melibatkan pelanggaran terhadap hukum negara.

Berbagai wujud ekstremisme politik yang dapat mengancam pluralisme dalam masyarakat antara lain:

1. **Radikalisme Agama**

Ekstremisme agama memiliki potensi untuk mengancam keragaman dalam masyarakat, dengan menolak konsep toleransi terhadap kepercayaan atau ritual keagamaan yang berbeda, serta mengklaim kebenaran mutlak bagi pandangan mereka sementara menganggap pandangan lain sebagai keliru atau sesat.

2. **Ekstremisme Politik**

Kelompok radikal menggunakan kekerasan atau tindakan ekstrem untuk menindas individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi mereka.

3. **Ekstremisme Sosial**

Gerakan yang ekstrem dalam memperjuangkan ideologi atau melakukan tindakan yang mengancam stabilitas sosial, seperti supremasi ras atau kelompok tertentu.

4. **Ekstremisme Global**

Kejamnya kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks kelompok Boko Haram telah mengakibatkan lebih dari 1000 gadis diculik dan mengalami pelecehan seksual sejak tahun 2013.

5. **Ekstremisme Retalisasi**

Tindakan kekerasan yang serupa tidak dapat disetujui dengan alasan apa pun, dan kerangka kerja rule of law merupakan landasan yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan harus ditangani di bawah yurisdiksi hukum yang netral.

6. **Ekstremisme Ideologi**

Tingkat ekstremisme yang tidak didasarkan pada agama semakin meningkat di negara-negara di Eropa dan Amerika, dengan kebangkitan kelompok atau organisasi yang

mempromosikan ideologi supremasi kulit putih, baik dari spektrum politik kiri maupun kanan.¹⁴

Ekstremisme politik menjadi ancaman serius bagi pluralisme dalam masyarakat, karena cenderung menolak keragaman dan toleransi, serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Beberapa faktor yang memperkuat kemunculan radikalisme politik mencakup dominasi sosial, sifat otoriter, dan egoisme kolektif.

Kelompok ekstremis dapat timbul dari berbagai latar belakang, mulai dari motivasi politik, keyakinan agama, hingga ideologi radikal. Misalnya, kelompok revivalis yang ingin mengembalikan dominasi agama dalam ranah politik, kelompok militan yang mengadopsi pandangan doktriner ekstrem dan bertindak destruktif, serta kelompok kepentingan yang mengeksploitasi agama untuk keuntungan politik.

Dampak ekstremisme politik bisa merusak ruang demokrasi dengan menentang nilai-nilai masyarakat yang mendasar dan mengancam kebebasan serta hak asasi manusia orang lain dengan tindakan yang mengesampingkan pertimbangan tersebut.

Upaya Pencegahan untuk Mencegah Terjadinya Ekstremisme Politik di Era Tantangan Pluralisme dalam Masyarakat Modern

Dalam menghadapi tantangan pluralisme dalam masyarakat modern, ada sejumlah langkah pencegahan dan strategi penanggulangan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya ekstremisme politik.:

Pendidikan memiliki peran sentral dalam mengurangi ekstremisme dengan menekankan nilai-nilai toleransi, keragaman budaya, dan dialog antarbudaya melalui sistem pendidikan formal. Selain itu, pendidikan juga berfungsi dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu ekstremisme.

Partisipasi politik yang aktif dari generasi muda menjadi penting dalam mempromosikan pemikiran kritis, etika, serta menghargai perbedaan pendapat. Pendidikan memainkan peran vital dalam membentuk generasi muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memahami implikasi dari tindakan kekerasan. Pengembangan keterampilan, baik melalui pendidikan formal maupun informal, merupakan upaya yang efektif dalam membentuk generasi muda yang mampu merespons dan meredakan ketegangan sosial yang berpotensi memicu ekstremisme.

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mencegah ekstremisme dengan memberikan dukungan kepada generasi muda dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta memastikan akses yang adil ke pasar kerja sebagai alternatif terhadap terlibat dalam aktivitas ekstremisme atau ilegal. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur merupakan langkah nyata menuju masyarakat yang lebih aman dari ancaman ekstrimisme dan terorisme. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, organisasi agama, dan masyarakat sipil, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari pengaruh ekstremisme. Etika dan sopan santun, yang harus ditekankan oleh semua pihak, baik guru maupun siswa, berperan dalam mencegah radikalisme agama yang mungkin muncul dalam konteks lembaga pendidikan.

Program deradikalisasi dapat membantu memperbaiki pemahaman yang keliru dan membangun keharmonisan bangsa dengan mengurangi paham kekerasan. Pelibatan masyarakat atau sosial dalam mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan, seperti yang disebutkan dalam Perpres No 7/2021, merupakan langkah yang patut diapresiasi. Upaya pencegahan teknis, seperti penggunaan teknologi dan alat pemantauan, dapat menjadi tambahan efektif dalam mencegah ekstremisme politik. Dalam menghadapi merebaknya ekstremisme politik di tengah tantangan

¹⁴ IPAC, Indonesia' *Lamongan Network: How East Java, Poso And Syria Are Linked*. Report No. 18, 2015.

pluralisme dalam masyarakat modern, pendekatan pemulihan melalui pendidikan moderasi menjadi sangat relevan. Pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai moderasi agama dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan menerima perbedaan dengan toleransi yang lebih tinggi.

Dampak dari maraknya ekstremisme politik di era tantangan pluralisme dalam masyarakat modern meliputi beberapa hal:

1. Konflik Sosial

Ekstremisme dalam politik memiliki potensi untuk memicu konflik sosial yang mengancam keamanan nasional.¹⁵

2. Hak Asasi Manusia

Ekstremisme politik dapat mengancam hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, kebebasan berkewarganegaraan, dan partisipasi dalam kehidupan politik.

3. Ketidakpastian Ekonomi

Ekstremisme politik dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, termasuk penurunan investasi, pendapatan, dan peluang kerja.

4. Kerusakan Masyarakat

Ekstremisme politik dapat merusak struktur masyarakat, seperti memperdalam pemisahan sosial, melanggar hak asasi manusia, dan mengurangi tingkat toleransi..¹⁶

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan, masyarakat dapat meningkatkan kualitasnya dan menciptakan lingkungan yang aman serta terlindungi dari ancaman ekstrimisme politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Demokrasi adalah faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Demokrasi bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak minoritas, membantu mereka, mencapai tujuan mereka, dan menerapkan sikap toleransi. Sebagai pemimpin bangsa, ideologi bangsa, pelindung rakyat bangsa dan bangsa itu sendiri. Pancasila menyediakan fondasi filosofis yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai yang paling penting dalam kehidupan rakyat, pemerintah, dan bangsa.

Ekstremisme politik terkait dengan konsep keberagaman populasi. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada ideologi politik ekstrem, termasuk kontrol sosial, ideologi politik, dan populisme. Pendidikan, partisipasi politik, pengembangan keterampilan, empowerment ekonomi, sosialisasi dan pemahaman, kerja sama tim, solidaritas, etika dalam konflik, program anti-korupsi, dan politik ekstrem semua dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih damai.

Tantangan yang perlu dihadapi dalam masyarakat modern yang pluralistik adalah Ekstremisme Politik. Hal ini menjadi argumen yang sangat kuat dalam masyarakat massa modern bahwa nilai-nilai Demokrasi dan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Kami selaku penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Yuwono Prianto S.H., M.H. selaku Dosen kami pada mata kuliah Humaniora kelas D karena sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menulis artikel ini. Terima kasih juga kepada seluruh sumber yang tercantum dalam artikel ini karena sudah memberikan informasi dan inspirasi yang sangat membantu sehingga kami dapat menyelesaikan artikel kami dengan judul “Demokrasi, Pancasila, dan Ekstremisme Politik: Mengatasi Tantangan Pluralisme dalam Masyarakat

¹⁵ Abuza, Zachary () *Political Islam and Violence in Indonesia*, (London and New York: Routledge, 2007) h. 84-91.

¹⁶ Wiktorowicz, Q. *Islamic Activism and Social Movement Theory*, (Bloomington: Indiana University Press, 2004) h. 66.

Modern”. Penulisan artikel ini ditulis untuk memenuhi nilai mata kuliah Humaniora semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Zachary. (2007) *Political Islam And Violence In Indonesia*. London and New York: Routledge .
- Allport, Gordon W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley Publishing Company
- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso
- BPIP. (2023). *Pancasila: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Damayanti, N. R. (2022). Apa itu Pancasila? Ini Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya.
- Eliada, Mircea. (2002). *Mitos Gerak Kembali yang Abadi*. Ikon teralitera.
- Fukuyama, Francis. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus, and Giroux
- Huntington, Samuel P. (1996) *The Clash of Civilizations*. Simon & Schuster,
- IPAC. (2015). *Indonesia's Lamongan Network: How East Java, Poso and Syria Are Linked*. Report No. 18.
- Lijphart, A. (2012). *The Role of Democracy in Plural Societies*. Oxford University Press
- Mounk, Y. (2017). *Democracy and Pluralism*. Harvard University Press.
- Mulkan, A.M. dan Bilveer S. (2015) *Dari I'dad ke Jihad*. Yogyakarta: Episteme Publishing.
- Sen, Amartya. (2006). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. W. W. Norton & Company
- Wiktorowicz, Quintan. (2004) *Islamic Activism and Social Movement Theory*. Bloomington: Indiana University Press.
- Yusuf, M. A. (n.d). *Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip*.